

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita, 2007).

Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007).

Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. *Sutrisno (1984: 200)* pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemda dan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk

membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama dan sangat penting bagi pemerintah daerah yaitu pajak daerah. Jadi, pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaan PAD, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah dan dibutuhkan sosialisasi dari pemda untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai PAD dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Transparansi anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan.

a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V(lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1). Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerbangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2). Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana sudah dirubah dengan UU nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah terutama berasal dari retribusi daerah.

3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- Jasa giro.
- Pendapatan bunga.
- Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang

bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB (Produk Domestik Regional bruto) suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintahannya. Dengan kata lain semakin tinggi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Halim, 2001). Ini berarti PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu komponen penting untuk mengetahui potensi daerah sebagai upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut (*H. Saberan, 2002: 5*) Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu: Pertama; Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa, Kedua; Domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan, ketiga; Regional, artinya perhitungan nilai produk yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan, dan *Keempat*;

Bruto, maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

a. Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan empat cara pendekatan yaitu:

1). Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi dapat disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto (NTB) dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipain oleh unit produksi sebagai input antara nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.

2). Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah dan keuntungan) tidak diperhitungkan.

3). Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial; pembentukan modal; dan ekspor. Mengingat nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi

domestik, total pengeluaran dari komponen-komponen diatas harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto. Penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

4). Metode Alokasi

Metode ini digunakan jika data suatu unit produksi disuatu daerah tidak tersedia. Nilai tambah suatu unit produksi didaerah tersebut dihitung dengan menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang tingkatnya lebih tinggi, misalnya data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data Provinsi.

Beberapa alokator yang digunakan adalah nilai produksi bruto atau neto, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya yang dianggap cocok untuk menghitung nilai suatu unit produksi.

Menurut (*Sadono Sukirno,2004*) PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut.

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak

dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Menurut Boediono (2008) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk.

Menurut Nugreheni (dalam Prasetyo, 2010), pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat,

b. Beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi antara lain:

1). Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB), atau ditingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

2). Produk Domestik Bruto Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita

Produk Domestik Bruto Per Kapita atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan

kesejahteraan penduduk suatu negara atau suatu daerah yang bersangkutan, atau disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

Nilai PDRB atau pendapatan perkapita diperoleh dari berbagai pendapatan nasional bruto atau pendapatan domestik bruto pada suatu tahun tertentu dengan jumlah produk pada tahun tersebut. Dengan demikian, pendapatan perkapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu persamaan sebagai berikut (Sadono Sukirno, 2004):

$$(a). \text{PerkapitaPNB} = \frac{\text{Pendapatan Nasional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$(b). \text{PerkapitaPDB} = \frac{\text{Pendapatan Domestik Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk mengkonsumsi barang dan jasa. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2006).

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula

kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

3. Jumlah Penduduk

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (Wirosardjono, 1998).

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Alasannya sederhana, karena penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar pelaksanaan hasil-hasil perencanaan dapat berjalan dengan baik. Penduduk juga merupakan motor penggerak pembangunan, juga dapat bertindak sebagai obyek, dimana akan menjadi salah target dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, analisis kependudukan sangat mendukung efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan agar berhasil sebagaimana diharapkan.

a. Dampak positif pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk membawa dampak positif dan negatif bagi manusia. Beberapa dampak positifnya antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
- Bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal.
- Meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia.
- Meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, agar produktivitas lahan pertaniannya meningkat, manusia mengembangkan pupuk dan benih unggul untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat.

b. Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk

Disamping dampak positif, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terutama jika tidak diimbangi dengan kualitas penduduk dan ketersediaan sarana prasarana hidup serta lapangan pekerjaan. Beberapa dampak tersebut antara lain sebagai berikut.

- Meningkatnya Angka Pengangguran

Angka pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menimbulkan masalah pengangguran. Sebagian tenaga kerja tidak terserap oleh lapangan kerja yang ada karena kecepatan pertumbuhan lapangan kerja baru kalah oleh kecepatan pertumbuhan penduduknya.

- Meningkatnya Angka Kriminal

Banyaknya tenaga kerja yang menganggur atau belum mendapatkan pekerjaan sangat rentan terhadap perilaku kejahatan atau kriminal. Desakan kebutuhan dapat memaksa sebagian penduduk untuk melakukan tindak kejahatan.

- Meningkatnya Angka Kemiskinan

Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya, khususnya sumber daya alam. Jika penduduk bertambah, harus disediakan lahan baru untuk memenuhi kebutuhan pangan/makanan dan rumah untuk tinggal. Diperlukan lowongan pekerjaan baru bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Jika tidak terpenuhi, akan muncul masalah kemiskinan.

- Berkurangnya Lahan untuk Pertanian dan Permukiman

Bertambahnya penduduk di suatu wilayah tentu membutuhkan lahan pertanian dan permukiman baru. Setiap penduduk yang lahir memerlukan rumah untuk tinggal dan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Makin banyak yang lahir, makin banyak lahan pertanian dan permukiman baru yang harus disediakan. Pada gilirannya, lahan pertanian yang ada akan berkurang karena dipakai untuk permukiman.

- Makin Banyaknya Limbah dan Polusi

Kegiatan penduduk, baik kegiatan di rumah, kegiatan perdagangan, atau industri pasti menghasilkan sampah atau limbah. Makin banyak penduduk, makin banyak limbah yang dihasilkan. Pada gilirannya, sampah atau limbah akan berdampak buruk pula bagi manusia.

- Ketersediaan Pangan Makin Berkurang

Permukiman, industri, perdagangan, dan aktivitas manusia lainnya terus berkembang yang akhirnya mengubah fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Akibatnya, produksi pertanian berkurang dan terus berkurang. Ini berarti ketersediaan pangan juga akan makin berkurang dan terpaksa harus mendatangkannya dari daerah atau negara lainnya.

- Kesehatan Masyarakat Makin Menurun

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, khususnya di daerah perkotaan, akan membuat harga lahan makin mahal. Akibatnya, sebagian penduduk tidak mampu membeli lahan dengan luas yang cukup memadai untuk permukiman. Permukiman menjadi sangat padat sehingga tidak sehat. Apalagi jika sanitasinya buruk, tentu keadaan itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit.

- Berkembangnya Permukiman Tidak Layak Huni

Lahan yang makin terbatas akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk, terutama di daerah perkotaan, mendorong naiknya harga lahan sehingga sulit dijangkau oleh sebagian penduduk. Akibatnya, sebagian penduduk terpaksa tinggal di daerah yang kurang layak dengan membangun rumah seadanya. Biasanya, mereka membangun rumah di tepi sungai, sepanjang rel kereta api, atau lahan kosong milik pemerintah yang belum di manfaatkan Daerah tersebut dikenal sebagai daerah kumuh (slum area).

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.

c. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu:

1). Fertilitas (Kelahiran)

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Natalitas mempunyai arti yang sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang lingkungannya. Fertilitas menyangkut peranan kelahiran pada perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

2). Mortalitas (Kematian)

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian penting, tidak saja bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda – tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi penduduk guna perancangan pembangunan. Misalnya, perencanaan fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan, dan jasa – jasa lainnya untuk kepentingan masyarakat.

Data kematian juga diperlukan untuk kepentingan evaluasi terhadap program – program kebijakan penduduk.

3). Migrasi

Migrasi merupakan salah satu faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Peninjauan migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat adanya densitas (kepadatan) dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor – faktor pendorong dan penarik bagi orang – orang untuk melakukan migrasi, di pihak lain, komunikasi termasuk transportasi semakin lancar.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara atau pun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain.

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Widarjono dalam Budiharjo, 2003).

Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah. Simon dalam Todaro (2003) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah suatu masalah. Pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara – negara maju, maupun yang sedang berkembang. Semakin banyak orang, maka semakin banyak ide, semakin banyak orang yang mempunyai bakat dan kreativitas, semakin banyak tenaga ahli dan dengan demikian akan semakin berkembang teknologi. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan. Todaro (2003) juga mencatat bahwa pertumbuhan penduduk juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang – barang konsumsi, selanjutnya akan mendorong economic of scale dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi, dan pada akhirnya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang – barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja, sehingga pendapatan per kapita masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan penambahan penduduk pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Sukirno, 2003).

4. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Pembentukan Investasi merupakan faktor penting yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu Negara, ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka ada sejumlah modal yang ditanam atau dikeluarkan, atau ada sejumlah pembelian barang dan jasa di masa akan datang. Pembentukan investasi dapat dilakukan jika masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabungkan. Tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal tidak saja dapat meningkatkan faktor produksi atau pertumbuhan ekonomi namun juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam hal ini, jumlah pengangguran tentunya akan turun. Suatu Negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar dari pada nilai penyusutan faktor-faktor produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi. Stagnasi merupakan suatu kondisi dengan laju pertumbuhan yang lambat dan bahkan bias nol. Kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya pengangguran dalam jumlah yang relatif besar. Kondisi yang sangat tidak diinginkan adalah kondisi stagnasi yang diikuti dengan adanya inflasi yang tinggi sehingga perekonomian Negara menjadi stagflasi.

Dalam ekonomi makro, investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto, PDB atau Gross Domestic GDP. Sehingga pengaruh investasi terhadap perekonomian suatu Negara dapat

ditinjau dari pendapatan nasional Negara tersebut. GDP yang dihitung berdasarkan pengeluaran terdiri dari empat komponen utama yaitu konsumsi dinotasikan C, investasi dinotasikan I, pembelian oleh pemerintah dinotasikan G, dan total bersih ekspor atau ekspor neto dinotasikan dengan X-M. Notasi X untuk ekspor dan M atau impor, Ekspor neto (X-M) menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan impor. Bentuk aljabar dari GDP dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

$$Y = \text{GDP}$$

Dari persamaan dapat diketahui bahwa investasi berkorelasi positif dengan GDP, secara umum dapat dikatakan jika investasi naik, maka GDP cenderung naik. Atau sebaliknya, jika investasi turun maka GDP cenderung turun. Investasi dipengaruhi oleh tingkat pengembalian modal dan tingkat bunga. Para pemilik modal akan berinvestasi jika tingkat pengembalian modal lebih besar dari pada tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi menyebabkan investasi menjadi tidak menarik atau tidak menguntungkan. Ketika tingkat bunga tinggi sebagian modal digunakan untuk mencari keuntungan dari tingkat bunga melalui deposito dan tabungan. Tingkat bunga tinggi pada akhir akan mengurangi jumlah modal yang diinvestasikan jika pengeluaran investasi berkurang maka GDP cenderung menurun.

Investasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, maka setiap daerah berupaya menciptakan iklim yang dapat menggalakan investasi dan pendapatan suatu daerah. Di suatu daerah investasi sangat penting karena merupakan dana untuk membiayai berbagai

macam kegiatan. Investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah yang mampu mengembalikan nilai pokok di tambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. (Permendagri No.52:2012).

Investasi merupakan kunci utama untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari kemampuannya meningkatkan laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan. Semakin besar investasi suatu negara akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi investasi (Haryanto, 2005). Selain itu investasi juga memperluas kesempatan kerja, mendorong kemajuan teknologi dan spesialisasi dalam produksi sehingga meminimalkan ongkos produksi serta penggalian sumberdaya alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan perekonomian daerah (Machmud, 2002). Pendapat tersebut didukung dengan adanya UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan investasi baik investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga akan pemeratakan dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara kontinyu yang disebut sebagai pembangunan ekonomi.

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh

penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai penanaman modal diatur didalam undang-undang No. 25 tahun 2005 tentang penanaman modal. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Menurut Boediono, Investasi adalah pengeluaran (dihitung dalam jutaan rupiah) oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang-barang/ jasa, yaitu untuk penambahan stok barang, di gudang atau untuk perluasan pabrik. Ini berarti bahwa barang-barang tersebut dibeli dengan harapan untuk menghasilkan keuntungan kemudian. Ini selanjutnya berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh perusahaan dalam memutuskan apakah membeli atau tidak membeli barang-barang/jasa-jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha akan kemungkinan keuntungan yang bisa diperoleh (dengan menjual kemudian barang-barang tersebut, atau menggunakan untuk proses produksi). Harapan keuntungan inilah yang merupakan faktor utama dalam keputusan tersebut. Faktor keuntungan yang diharapkan biasanya dinyatakan dalam dua dimensi yaitu dimensi yang menunjukkan berapa besar

keuntungan yang akan diperoleh untuk setiap rupiah yang ditanamkan, dan dimensi waktu yang menunjukkan berapa lama aliran keuntungan ini berlangsung.

Sumantoro mengemukakan, bahwa “Investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut”. Dari pengertian tersebut kegiatan investasi mengandung pengertian yang luas, karena investasi dapat dilakukan secara langsung (*direct investment*) maupun secara tidak langsung, yang lebih dikenal dengan (*portfolio investment*). Terdapat perbedaan pengertian antara investasi secara tidak langsung (*portfolio investment*) yaitu biasanya dengan membeli instrumen-instrumen di pasar modal dan investasi secara langsung (*direct investment*) yaitu biasanya yang bersangkutan ingin ikut menguasai dan menjalankan (mengelola) langsung investasi. Pada kasus investasi yang pertama (*portfolio investment*), para investor tidak tertarik dan tidak berkepentingan untuk menjalankan usaha dari perusahaan yang ia beli sahamnya, mereka lebih berkepentingan terhadap deviden dan *capital gain* dari saham yang ia beli. Sedangkan pada kasus investasi yang kedua (*direct investment*), investor yang bersangkutan ingin menguasai dan menjalankan langsung investasi yang dimaksud.

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan atau penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa

yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang.

a. Bentuk-bentuk investasi antara lain :

1). Investasi Tabungan Berjangka

Investasi ini adalah investasi yang tidak beresiko. Fungsinya hampir sama seperti menabung tetapi uang tidak dapat diambil sebelum jangka waktu tabungan berakhir.

2). Deposito

Seperti tabungan berjangka tetapi kurun waktunya tidak sepanjang tabungan berjangka. Selain itu, deposito memiliki bunga yang cukup besar dari tabungan berjangka.

3). Investasi Emas

Investasi ini merupakan salah satu investasi yang menguntungkan karena nilai emas selalu naik sebanyak 30% dalam satu tahun. Uang bisa mengalami inflasi tetapi nilai emas selalu tetap.

4). Investasi Saham

Untuk investasi ini harus benar-benar memperhatikan dengan baik kondisi pasar atau bursa saham karena nilainya naik turun disesuaikan dengan fluktuasi pasar.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi antara lain:

1). Tingkat Suku Bunga

Apabila tingkat bunga naik, maka investor saham akan menjual seluruh atau sebagian sahamnya untuk dialihkan ke dalam investasi lainnya yang relatif lebih menguntungkan dan bebas resiko, akibatnya indeks akan turun. Sebaliknya bila tingkat bunga turun, maka masyarakat akan mengalihkan investasinya pada saham yang relatif lebih *profitable* dan akibatnya indeks akan naik. Dengan demikian tingkat bunga akan memberikan pengaruh negatif terhadap indeks saham.

2). Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif.

3). Pendapatan Nasional

Dengan adanya tingkat pendapatan yang tinggi maka akan mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga keuntungan perusahaan akan bertambah dan akan mendorong kegiatan investasi yang lebih banyak. Jika nilai pendapatan nasional bertambah maka nilai pasar investasi akan bertambah pula.

4). Infrastruktur

Pembangunan kembali infrastruktur dapat menjadi suatu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang

selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.

B. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan bagian terpenting dalam suatu laporan hasil penelitian. Menurut Uma Sekaran (2006; 14), kerangka penelitian merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai masalah yang penting. Suatu konseptual memberikan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah (obyek) penelitian.

1. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam Negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk Negara tersebut tetapi oleh penduduk Negara lain yang bertempat tinggal di Negara tersebut (Sukirno,2003:33)

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif

bagi diubahnya struktur produksi pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2006).

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (Saragih, 2003). Pendapat ini sejalan dengan Hakim Halim (2000), bahwa Pendapatan Asli Daerah di pengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto.

Santosa dan Rahayu (2005), menyatakan hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya, akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Penelitian yang dilakukan Arief Eka Atmaja (2011) mengungkapkan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan, hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif.

Adanya peningkatan PDRB yang semakin besar akan mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah. Apabila PDRB meningkat ada indikasi

bahwa Pendapatan Individu meningkat sehingga daya beli masyarakat naik dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula. (Wirosardjono, 1998).

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau Negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau Negara tersebut. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat (Simanjuntak, 2001). Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan disuatu wilayah. Menurut, Population Reference Bureau (PRB) (2011).

Agus Widarjono (Budiharjo, 2003:159) mengatakan bahwa, jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai asset modal besar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban. Pembangunan sebagai asset apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut

pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Menurut Adam Smith (limcolin Arsyad, 1999) Penambahan Jumlah Penduduk yang tinggi di iringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Esti (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa variable jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

Dengan meningkatnya penduduk yang tinggi berpengaruh apabila penduduk menghasilkan barang atau jasa. Tetapi, komposisi usia produktif dan tidak produktif selisihnya tidak terlalu jauh sehingga kelompok usia produktif menjadi beban masyarakat mengakibatkan jumlah penduduk tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Hubungan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat saling mempengaruhi. Investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya investasi, maka akan menambah penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah. Meningkatnya

penerimaan daerah akan memicu pemerintah untuk mendukung dan mendorong masyarakatnya untuk berinvestasi.

Dengan berinvestasi masyarakat akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak daripada menabung biasa. Selain itu, investasi juga dapat meningkatkan modal dan keuntungan bagi perusahaan. Dengan meningkatnya keuntungan masyarakat, maka masyarakat akan terus berinvestasi dan keuntungan bagi perusahaan yang berinvestasi pun akan semakin meningkat. Semakin banyak masyarakat atau perusahaan dalam suatu daerah yang berinvestasi maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah juga ikut meningkat.

Penelitian yang dilakukan Satriya, Himawan Eka (2009), mengungkapkan bahwa jangka panjang variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya investasi di suatu daerah akan menambah pendapatan di daerah tersebut.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Satriya, Himawan Eka (2009), dengan Judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Jawa Tengah selama periode 1981-2006. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan variable dependen Pendapatan Asli Daerah dan variable independen Investasi, PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah. Alat Analisis yang digunakan Error Correction Model (ECM). Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa jangka panjang variabel investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh

signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan tingkat signifikan pada derajat 0,05 atau 5 persen, variabel investasi berpengaruh signifikan pada $\alpha = 10$ persen dan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0,01$ persen.

Penelitian yang dilakukan oleh Esti (2011), dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen selama periode 1991-2008”. Tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, jumlah perusahaan, jumlah penduduk dan untuk mengetahui variabel yang dominan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sragen. Alat Analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Eka Atmaja (2011), dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Semarang selama tahun 2004-2008”. Tujuan untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Semarang. Alat analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Dari hasil analisis dalam penelitian ini secara bersama-sama variabel pengeluaran

daerah, jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara individual, variabel pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan PDRB dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah, yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pendapatan asli daerah adalah jumlah penduduk. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisiensi regresi tertinggi yaitu 5,742 persen.

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Rindu Datu K (2012), dengan judul “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Makassar selama tahun 1999-2009”. Tujuan untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui PDRB dan berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut Adi Hartyanto (Hartyanto Adi, 2014) dalam penelitiannya Studi tentang Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung Pemerintah Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila, menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang paling signifikan dalam jangka panjang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) begitu juga dengan nilai pertumbuhan belanja langsung pemerintah daerah. Sedangkan jumlah penduduk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, secara umum semua variabel baik pertumbuhan ekonomi, belanja

langsung, dan jumlah penduduk mempengaruhi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Hipotesis

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah :

H1: Di duga ada pengaruh positif antara Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H2: Di duga ada pengaruh positif antara Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H3: Di duga ada pengaruh positif antara Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Model Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan variabel-variabel yang akan diteliti, maka model penelitian dapat digambarkan seperti berikut:

